

BAB IV

FAKTOR EKSTERNAL JEPANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 telah menunjukkan ketidakberdayaan Indonesia dalam menghadapi krisis tersebut. Situasi ini memicu Indonesia untuk berpaling kepada negara-negara maju guna menyelesaikan krisis tersebut, salah satunya dengan Jepang. Kenyataan ini mendorong terbentuknya kerjasama antara Indonesia dengan Jepang lebih mendalam. Hal tersebut mencerminkan bahwa ada interdependensi kedua negara dalam aspek ekonomis. Dua hal yang menjadi landasan kerjasama Indonesia dengan Jepang adalah prinsip saling ketergantungan dan saling melengkapi. Dalam perkembangannya, kerjasama Indonesia-Jepang semakin komprehensif jangkauan sektor-sektornya.

Kerjasama Indonesia-Jepang didukung juga dengan karakter para pemimpin Jepang yang cenderung tertarik melakukan kerjasama bilateral dibanding multilateral. Para pemimpin Jepang meyakini bahwa kerjasama bilateral akan lebih mempererat hubungan karena dengan begitu sentimen politik kecil peluangnya untuk mencuat.

Miyazawa Plan adalah catatan penting dalam kajian hubungan ekonomi

negara di Asia untuk keluar dari krisis ekonomi. Kebijakan ini dinilai cukup berhasil membawa keluar Indonesia dari krisis. Sejak pertama kali diluncurkan, Miyazawa Plan mendapat sambutan positif dari Soeharto dan juga pemimpin negara lainnya. Melalui Miyazawa Plan, Jepang mengucurkan dana sebesar US\$ 30 milyar untuk didistribusikan kepada negara-negara krisis, termasuk Indonesia, keunggulannya adalah Miyazawa Plan tidak menetapkan syarat-syarat tertentu seperti yang dilakukan oleh IMF.

Namun, kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang pasca krisis tersebut tidak diiringi oleh naiknya investasi asing langsung dari Jepang. Bahkan selama periode 2007-2009, investasi dari Jepang mengalami penurunan, yaitu US\$ 1,125 juta tahun 2007, kemudian turun menjadi US\$ 856 juta pada tahun 2009.

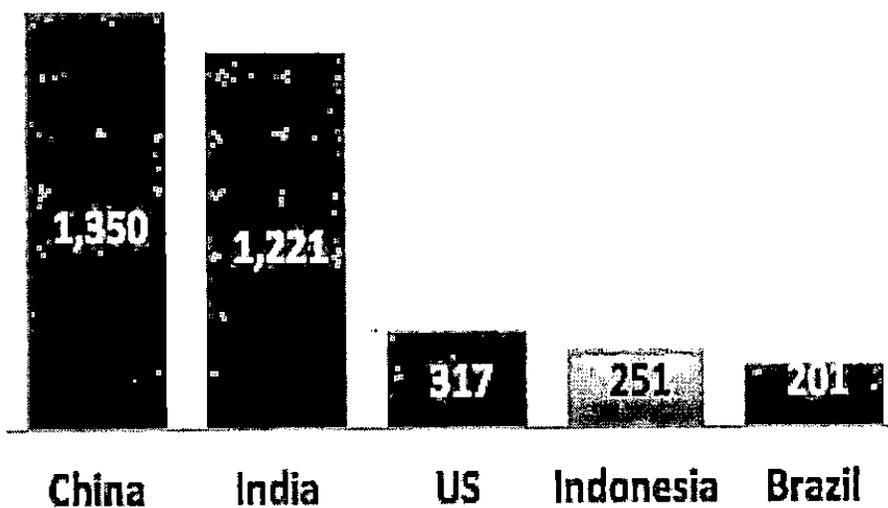
Maka dari itu, perlu diperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan investasi Jepang di Indonesia pada tahun 2009-2012, karena pada tahun tersebut investasi Jepang meningkat signifikan, dari US\$ 856 juta pada tahun 2009 meningkat menjadi US\$ 3,729 juta pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 meningkat US\$ 6,175 juta dan naik menjadi US\$ 7,926 pada tahun 2012.

A. Situasi dan Kondisi Perekonomian Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Di samping transformasi yang luar biasa di bidang fiskal dan politik,

struktural yang penting dari segi demografi. Dari 240 juta penduduk, lebih dari sepertiga berumur di bawah 29 tahun, dan sebagian besar tinggal di daerah perkotaan. Ini mengilustrasikan angkatan kerja yang dinamis di dalam pasar tenaga kerja yang bertumbuh sebesar 2,3 juta orang per tahun. Tingkat urbanisasi yang cepat ini merupakan sumber tenaga kerja strategis di pusat-pusat investasi daerah urban.⁵³

Grafik 4.1 World's Top-5 Population by Country (million people)



Sumber: *ASEAN Community in Figures 2011*.

Salah satu hal yang menjadi pondasi perekonomian Indonesia yang kuat adalah stabilitas politiknya. Sepuluh tahun yang lalu, banyak analis yang meramalkan bahwa perpecahan yang terjadi pada provinsi-provinsi di Indonesia

⁵³ BKPM, *Basis Demografi Dinamis*,

akan menyebabkan terjadinya “Balkanisasi” di Indonesia. Kemudian pada tahun 2001, Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya desentralisasi yang ambisius. Dalam catatan World Bank diungkapkan tentang Indonesia, “*Salah satu Negara dengan demokrasi yang bersinar di Asia Pasifik yang telah berhasil mempertahankan stabilitas politiknya...*” (The World Bank, 2013). Walaupun terus diujikan dengan berbagai tantangan, kini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang telah mengalami desentralisasi di dunia yang melakukan delegasi kekuasaan dan dengan baik ke daerah-daerahnya.

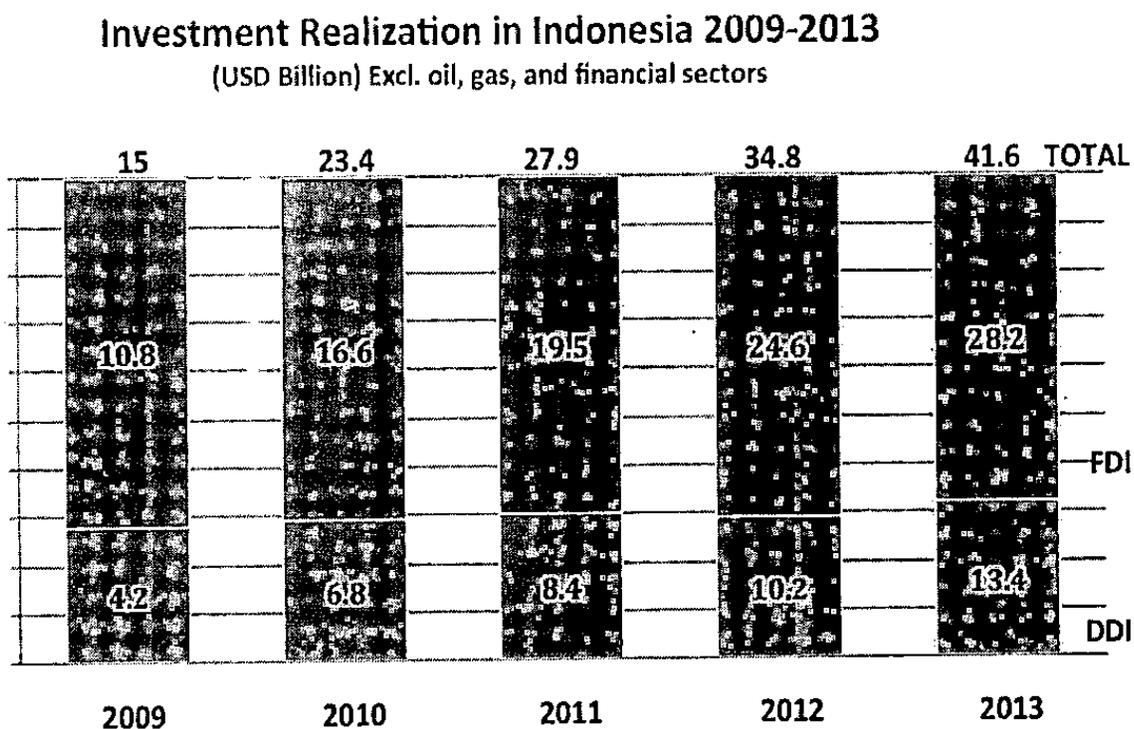
Secara signifikan, Indonesia telah menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang telah melewati *trend* demokrasi yang penuh permasalahan. Demokrasi telah tumbuh dengan baik di Indonesia, sebuah negara yang tadinya berada di bawah kekuasaan bertangan besi selama lebih dari 30 tahun. Indonesia telah berhasil bertransformasi dengan baik dari negara otoriter menjadi contoh yang baik bagi negara-negara lain di Asia Tenggara.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan kekuatan ekonomi global di Asia. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperkirakan telah menembus angka US\$ 1 triliun di tahun 2012, Indonesia telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dengan resistensinya terhadap krisis keuangan global dibanding negara-negara tetangga, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,7% di tahun 2013 dan

lima tahun terakhir (2009-2014, (pen.))” oleh publikasi terkemuka dunia The Economist.⁵⁴

Salah satu faktor kesuksesan ekonomi Indonesia dipicu oleh pertumbuhan kelas menengah and pertumbuhan ekonomi makro yang stabil. Indonesia kini termasuk di dalam negara MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria and Turki), yakni negara-negara dengan perekonomian paling menarik bagi investor jangka panjang karena karakteristik demografis-nya.⁵⁵

Grafik4.2 Indonesia’s Investment Performance



Sumber: BKPM, <http://www.bkpm.go.id/contents/general/8/demografi#.UyLb7Wcxzcc>.

⁵⁴ BKPM, Perekonomian yang Sehat, <http://www.bkpm.go.id/contents/general/4/perekonomian->

Sebagai hasilnya, Indonesia terus mendapatkan pemberitaan yang positif. Pemberitaan tersebut mencerminkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global, meningkatkan angka penilaian terhadap pemerintahan dan kredit eksternal, juga kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perubahan-perubahan yang terjadi di panggung politik dalam negeri.

Menurut PricewaterhouseCoopers, Indonesia merupakan pasar yang terkenal dengan sumber daya alamnya, bahkan dari prospek bahan mineral dikatakan lebih menarik dibandingkan negara lain seperti Afrika Selatan, Australia dan Kanada.⁵⁶

Sebagai contoh, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati nomor dua setelah Brasil. Sumber daya alam merupakan peluang investasi yang luar biasa. Selain itu, potensi pengembangannya masih jauh dari titik jenuh, khususnya di bidang energi terbarukan.

jumlah populasi berasal dari kelas menengah yang tumbuh dari angka 37,7% pada tahun 2003. Angka ini diperkirakan akan terus naik ke nilai 70% pada tahun 2015.⁵⁷

B. Kebijakan Politik Ekonomi Strategis Indonesia

Peningkatan ekonomi-makro dan seting kebijakan struktural sejak krisis di Asia telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, serta penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Reformasi institusi dan kebijakan lanjutan mampu mendorong pertumbuhan produktifitas dan membantu pemerintah mencapai tujuannya untuk menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2015, sambil tetap mendukung alur pembangunan yang inklusif dan ramah secara sosial.

Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar kelima di Asia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah. Berkat serangkaian kebijakan reformasi yang kokoh dan peningkatan kinerja pemerintah, kemajuan signifikan telah mampu diraih pada dimensi sosial dan pendidikan sejak krisis Asia tahun 1997-1998, dan kualitas *human capital* meningkat secara signifikan. Kinerja ekonomi-makro yang kuat merupakan dampak dari keberhasilan pengelolaan kebijakan dan reformasi substansial yang dilakukan sejak krisis Asia yang turut menguatkan kerangka ekonomi-makro dan meliberalisasikan rezim perdagangan internasional. Investasi yang besar pada jejaring industri telah mendorong dihasilkannya

output potensial. Perekonomian juga didukung oleh dinamisnya usaha kecil, yang mampu membuka banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan produksi.

Tabel 4.2 Beberapa indikator terpilih bagi Indonesia

	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011
Populasi								
Total dalam juta	194.8	206.3	220.9	224.2	227.6	234.4	237.6	241.0
Distribusi usia (persen)								
0-14	33.1	30.2	28.5	27.7	27.4	27.0	26.7	26.4
15-64	62.7	65.0	66.3	66.9	67.2	67.4	67.7	67.9
65+	4.2	4.7	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7
Angka kemiskinan absolut ¹ (persen)	-	19.1	16.0	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5
Koefisiensi Gini	0.36	-	0.36	0.36	0.35	0.37	0.38	0.41
Rasio bersih pendaftaran siswa baru (pendidikan menengah, dalam persen)	-	46.7	56.0	65.7	64.5	65.1	67.3	-
Pekerjaan dan inflasi								
Pekerjaan (dalam juta)	80.1	89.8	93.4	99.9	102.6	104.9	108.2	109.7
Pekerjaan informal (persentase pekerjaan)	-	-	69.5	69.5	69.6	69.3	65.9	62.2
Angka pengangguran (persen)	-	6.1	11.2	9.1	8.4	7.9	7.1	6.6
Inflasi CPI/indeks harga konsumen (persen, akhir tahun)	9.0	9.3	17.1	6.6	10.2	2.8	7.0	3.8
Pennintaan dan penawaran								
GDP (dalam triliun rupiah terkini)	454.5	1 385.8	2 774.3	3 950.9	4 948.7	5 606.2	6 436.3	7 427.1
GDP (dalam juta USD terkini)	202.4	166.1	285.6	432.2	512.7	543.3	708.8	846.1
Pertumbuhan GDP (ril, persen)	8.2	4.9	5.7	6.3	6.0	4.6	6.2	6.5
Pertumbuhan GDP per kapita (ril, persen)	6.1	4.5	4.4	5.3	4.9	3.6	2.3	5.4
Permintaan (pertumbuhan, persen)								
Konsumsi pribadi	12.6	1.6	4.0	5.0	5.3	4.9	4.7	4.7
Konsumsi public	1.3	6.5	6.6	3.9	10.4	15.7	0.3	3.2
Pembentukan modal tetap	14.0	16.7	10.9	9.3	11.9	3.3	8.5	8.8
Eksper	7.7	26.5	16.6	8.5	9.5	-9.7	15.3	13.6
Impor	20.9	25.9	17.8	9.1	10.0	-15.0	17.3	13.3
Penawaran (persen dari GDP nominal)								
Pertanian	-	15.6	13.1	13.7	14.5	15.3	15.3	14.7
Pertambangan	-	12.1	11.1	11.2	10.9	10.6	11.2	11.9
Manufaktur	-	27.7	27.4	27.0	27.8	26.4	24.8	24.3
Jasa ²	-	44.6	48.3	48.1	46.8	47.8	48.7	49.1
Keuangan publik (pemerintah pusat, persentase GDP)								
Pendapatan	15.7	14.8	17.9	17.9	19.8	15.1	15.5	16.3
Pengeluaran	14.4	15.0	18.4	19.2	19.9	16.7	16.2	17.4
Nominal saldo	1.3	-1.2	-0.5	-1.3	-0.1	-1.6	-0.7	-1.1
Gross utang	-	88.8	47.3	35.2	33.1	28.4	26.1	24.3
Sektor eksternal (persentase GDP)								
Keseimbangan perdagangan	3.2	15.1	6.1	7.6	4.5	5.7	4.3	4.1
Transaksi Berjalan saldo	-3.2	4.9	0.1	2.4	0.0	1.9	0.7	0.2
Dalam juta USD	-6.4	8.0	0.3	10.5	0.1	10.6	5.1	1.7
Cadangan internasional (kotor dalam juta USD)	-	-	34.7	56.9	51.6	66.1	96.2	110.1
Posisi pinjaman luar negeri (akhir tahun)	-	85.3	45.8	31.6	30.2	31.8	28.6	26.5

Sumber: Statistics Indonesia, *Government financial statement (audited)*, World Bank, and OECD calculations.

Perekonomian Indonesia ditargetkan terus tumbuh sekitar 6%. Konsumsi dan

... masalah yang

terjadi pada tahun 2008 ialah rendahnya pendapatan dari investasi yang mengakibatkan defisit fiskal. Pertumbuhan impor akan melebihi pendapatan ekspor. Tren ini kurang mendapat perhatian di negara berkembang seperti Indonesia; merefleksikan fakta bahwa kebutuhan investasi melebihi *domestic saving*, dimana pembiayaan dilakukan melalui pinjaman luar negeri dan pertumbuhan impor terus dikendalikan oleh peningkatan produktifitas barang-barang modal.⁵⁸

Tabel 4.3 Output pertumbuhan dan kontribusi potensial

Tahun	Pertumbuhan GDP	Pertumbuhan GDP Potensial	Kontribusi terhadap output pertumbuhan potensial		
			TFP	Modal	Buruh
1980-89	6,4	6,5	1	3,7	1,8
1990-97	7,6	6	0,9	3,9	1,3
1998-99	-6,2	1,9	-0,2	1,1	0,9
2000-09	5,1	4,1	1,5	1,7	1
2007	6,3	5,2	2,1	2	1,2
2008	6	5,6	2,1	2,3	1,3
2009	4,6	5,6	2,2	2,1	1,3
2010	6,2	5,8	2,2	2,3	1,3
2011	6,5	5,9	2,2	2,4	1,3

Source: OECD calculations using a production function approach detailed in OECD

1. Kebijakan Fiskal Indonesia: Membuka Perekonomian Lebih Luas Bagi Perdagangan Bebas dan Investasi Asing

Meski komitmen Indonesia terhadap perdagangan bebas sudah lama, beberapa aturan non-tarif diterapkan sejak akhir tahun 2008, merefleksikan kekhawatiran akan krisis ekonomi akan menyebar ke seluruh wilayah Asia. Jumlah aturan baru pembatasan perdagangan

lebih kecil dibanding Chinadan India, namun lebih tinggi dibanding negaratetangga.Lebih serius lagi, regulasi baru untuk membatasi rentang produk yang boleh diimpor oleh importer diharapkan mulai berlaku pada akhir tahun 2012.Meskipemerintah berkomitmen untuk menurunkan tarif, mereka masih memiliki aturan sumberdaya non-tarif, yang dapat dikenakan oleh salah satu lembaga pemerintah yang memilikihak prerogatif pada bidangnya, tanpa adanya koordinasi formal.Hanya beberapa dariaturan tersebut yang dapat dijustifikasikan pada bidang lingkungan dan kesehatanmasyarakat.Akan sangat baik jika lembaga independen diberikan tugas untuk mengevaluasi dampak dari aturan non-tarif tersebut terhadap perdagangan danperekonomian domestik serta mencabut semua aturan yang menghambat pertumbuhan.Seperti dimuat dalam *OECD Review of Regulatory Reform 2012*, pengurangan jumlah kementerian dan lembaga yang memiliki kemampuan untuk menetapkan batasan non-tarif akan dapat mencegah peningkatan hambatan yang eksesif di masa depan.⁵⁹

Meski mengalami kemajuan berkat diterbitkannya daftar investasi tahun 2007,hambatan investasi asing masih sangat ketat di Indonesia.Batasan kepemilikan asing diIndonesia masih lebih rendah dibanding rata-rata Asia pada semua sektor kecualliperbankan, pertambangan, minyak dan gas, dan listrik.⁶⁰Lebih jauh lagi,regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah atau kementerian kadang tak

⁵⁹*OECD Review of Regulatory Reform 2012.*

⁶⁰*World Development Report 2012: Growth Equity and Inclusion*. The World Bank Group, Washington, D.C.

konsistendengan UU Investasi dan memunculkan kebingungan. Beberapa regulasi daerah sudah direvisi dan diselaraskan dengan regulasi pemerintah pusat dan daftar investasi juga diperbaharui dalam Kepres No. 36/2010. Ketika banyak sektor yang diliberalisasikan, namun ada beberapa yang malah semakin terbatas.⁶¹

Pada Maret 2012, keputusan pemerintah memperketat pembatasan investasi asing dalam sektor pertambangan dan mengharuskan perusahaan pertambangan asing untuk melakukan investasi secara progresif hingga mencapai 49% pada tahun kesepuluh operasional. Lebih jauh lagi, beberapa pembatasan tetap diberlakukan pada sektor-sektor seperti farmasi, distribusi, telekomunikasi, transportasi maritim dan pendidikan. Pada beberapa kasus, hal ini bisa dijustifikasikan dengan alasan perlindungan lingkungan, keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan warisan budaya. Pemerintah telah mengumumkan bahwa mereka akan merevisi daftar investasi guna mendorong masuknya investasi asing pada sektor-sektor tersebut. Pemerintah telah mempertimbangkan secara seksama pelonggaran hambatan investasi asing pada sektor-sektor dimana mereka masih eksis, kecuali jika dijustifikasikan oleh masalah kepentingan publik. Investasi asing langsung diyakini bermanfaat bagi pertumbuhan dan pembangunan, sebab hal itu merupakan sumber daya untuk transfer

teknologi, mendorong diversifikasi resiko, dan dapat memperdalam pasar finansial.⁶²

2. Kebijakan Ekonomi Strategis Indonesia: Undang-undang Penanaman Modal

Sejak penanaman modal asing diumumkan pada tahun 1967, sejak itu pula tonggak pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumpu pada modal asing. Pengaruhnya hingga tahun 2012 terlihat nyata, semisal pada tahun 1999-2009 saja, total modal asing mencapai 70% total modal yang disetujui pemerintah, yang dalam angka sekitar 1.480 trilyun rupiah.⁶³

Dari tahun 2000-2005, jumlah penanaman modal asing meningkat hingga 3,5 kali lipat. Pemilik modal tersebut sebagian besar adalah Singapura, Inggris, Jepang, Australia, Belanda, Korea Selatan, Taiwan, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, yang tersebar dalam 975 proyek.⁶⁴

Bagi pemerintah Indonesia, tidak adanya aliran modal asing adalah suatu malapetaka. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi agar mudahnya aliran modal asing untuk masuk, di antaranya adalah: Undang-undang Nomor 18/2004 tentang Perkebunan yang pada bab 3 pasal 9 ayat (1), "Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang

⁶²Kose, M., E. Prasad, K. Rogoff and S.-J. Wei (2009), "Financial Globalisation: A Reappraisal", IMF Staff Papers, Vol. 56, No. 1, hlm. 8-62.

⁶³Survey OECD Perekonomian Indonesia, September, 2012.

⁶⁴Lipsey, R. and F. Sjöholm (2011), "Foreign Direct Investment and Growth in East Asia: A Reappraisal", *Journal of Economic Surveys*, Vol. 25, hlm. 25-26.

diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”; Undang-undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang pada bab 3 pasal 6 ayat (1) berbunyi, “Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.” Dari kedua undang-undang tersirat bahwa keterlibatan modal swasta dalam pengelolaan sumber daya alam bersifat terbuka, cermati redaksi “*hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai,*” dan “*dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama.*”⁶⁵

Pada tahun 2009, investasi asing tidak lagi bertumpu pada penanaman modal yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam seperti hutan, tambang dan migas. Akan tetapi juga mencakup pada pengelolaan BUMN, sektor-sektor pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, dll.), listrik dan telekomunikasi, perbankan, minyak dan mineral lainnya.

Undang-undang Penanaman Modal adalah salah satu dari bagian dari paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 yang salah satu programnya adalah mengubah Undang-undang Penanaman Modal

⁶⁵ Pengertian Kontrak Kerjasama dalam UU Minyak dan Gas pasal 6 ayat 1 tersebut adalah

yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestic dan asing.⁶⁶

Diadakannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah upaya pemerintah Indonesia guna menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dilihat dari kandungan UUPM, jelas sudah bahwa pemerintah mengerahkan segala modal nasional untuk dibuka bagi masuknya modal asing, dari sumber daya alam, hingga perlakuan non-diskriminatif antara investor domestik dan asing. Tentu saja hal demikian sangat menarik perhatian para investor asing untuk menyalurkan modalnya di Indonesia, dikarenakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sangat berpotensi untuk menciptakan peluang yang lebih besar guna meraup keuntungan di masa datang dari penanaman modal di Indonesia.

C. Keamanan Di Indonesia

Secara teoritis hampir dipastikan bahwa gerak pembangunan selalu bersentuhan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam konteks ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkesinambungan, gerak pembangunan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari adanya wajah ancaman yang berlangsung di tengah-tengah hiruk pikuknya isu-isu globalisasi beserta dampaknya, serta kecenderungan

negara-negara maju yang secara unilateral memainkan agenda globalnya terkait dengan isu keamanan internasional.⁶⁷

Dalam konteks yang lebih luas, melemahnya rezim ekonomi global yang ditandai dengan kemunduran pertumbuhan ekonomi dunia terasa sebagai beban yang berat bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan selama hampir setengah abad lebih, negara-negara berkembang sangat tergantung kepada negara-negara maju, baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

Berkaitan dengan perkembangan keamanan domestik Indonesia, sesungguhnya banyak dimulai oleh adanya stagnasi pembangunan ekonomi yang seharusnya dapat berimplikasi terhadap taraf kehidupan sosial masyarakat. Munculnya konflik-konflik vertikal maupun horizontal di beberapa daerah tidak terlepas dari adanya evolusi faktor ekonomi yang rapuh kemudian mengarah pada masalah keamanan. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi keamanan domestik yang cenderung labil dan sangat erat kaitannya pada persoalan ekonomi masyarakat pasca terjadinya krisis moneter dan ekonomi pada 1997 lalu.

Gangguan keamanan ekonomi di tanah air telah menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks dalam dinamika pembangunan nasional. Meskipun kini Indonesia telah mengalami pemulihan ekonomi secara

bertahap, namun di sana-sini masih terdapat berbagai gangguan ekonomi baik ditinjau secara makro maupun mikro.

Secara makro, perkembangan pasca orde baru menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi nasional yang semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata mengalami kendala mendasar. Kondisi ini dapat dilihat bahwa ada kecenderungan beberapa daerah yang memiliki potensi sumber daya menginginkan untuk memekarkan diri sebagai sebuah provinsi yang otonom. Pertimbangan beberapa daerah tersebut pada umumnya mempunyai alasan, yakni distribusi kesejahteraan yang tidak adil sehingga bermuara pada kecemburuan antar daerah akibat adanya kesenjangan kesejahteraan.⁶⁸

Secara sosial budaya, masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat moderat dan akomodatif, hal ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih bersifat terbuka untuk saling menghargai perbedaan suku, agama, maupun golongan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia meskipun bersifat pluralistikan tetap memiliki potensi dalam melaksanakan pola-pola hubungan sosial antar kelompok.

Terganggunya pola hubungan sosial masyarakat sebenarnya tidak terlepas dengan adanya euphoria demokrasi yang berlebihan dan kemudian justru merusak semangat reformasi. Adanya tindakan yang amat impulsive dan dangkal oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak terhadap kebebasan

⁶⁸ ...

yang tidak terkontrol sehingga mengancam stabilitas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁹

Oleh karena itu, secara faktual bila dilihat dari komposisi masyarakat Indonesia yang heterogen tersebut, yang juga disertai karakteristik geografis berupa negara kepulauan, tentu perlu disadari bahwa potensi ancaman integritas bangsa tidak dapat dipisahkan oleh meluasnya friksi-friksi komunal selama ini. Sebai contoh, bahwa konflik komunal selama ini dipisu oleh eksklusivisme suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta kesenjangan sosio-ekonomi. Selain itu, perpindahan penduduk secara massal dari satu wilayah ke wilayah lain berpengaruh terhadap tata kehidupan budaya setempat, dan juga berpotensi sebagai sumber konflik. Konflik yang terjadi di Maluku, Poso, Kalimantan (Sanggau Ledo, Sampit, Sambas), adalah contoh nyata konflik komunal yang berbasis etnis dan agama. Kerugian yang diakibatkan konflik komunal yakni timbulnya gelombang pengungsian, korban jiwa, serta kerugian harta benda yang cukup besar.

Isu keamanan yang timbul di dalam negara yang paling menonjol adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme, konflik komunal berciri ethno-religious, kelompok radikal, dan kerusuhan massal.

Isu-isu keamanan domestik lainnya adalah menyangkut kejahatan transnasional. Isu keamanan transnasional Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni gangguan keamanan di laut, gangguan keamanan

⁶⁹ Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*,

perbatasan, dan gangguan keamanan di udara. Sedangkan isu-isu yang sering terungkap adalah imigran gelap, penangkapan ikan secara illegal, penyelundupan senjata, dan penyelundupan obat-obatan terlarang.

Untuk memberantas tindakan yang mengancam keamanan nasional secara fisik, Indonesia pun mengerahkan seluruh kekuatan aparat, dari kepolisian hingga militer. Satuan-satuan aparat tersebut pun dipecah dalam setiap sektor-sektor daerah (kabupaten-kota). Tak luput juga titik-titik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional diberi perhatian khusus dengan cara disiagakannya personel dalam jumlah besar dan terlatih guna mengantisipasi terjadinya gejolak tertentu. Misalnya, Indonesia mengerahkan pasukan polisi dan militer di Papua Barat guna menumpas gerakan separatisme yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), operasi militer TNI yang dikerahkan guna menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan goncangan sosial.

Dalam kaitannya antara keamanan dengan investasi asing, terlihat bahwa pemerintah Indonesia menjamin ketahanan modal dari investor agar tidak terganggu. Hal demikian terlihat pada jaminan keamanan yang diberikan pemerintah kepada PT. Freeport Mc. Moran di Papua dari gangguan yang dilakukan oleh OPM, keamanan aset berupa lahan guna pembangunan industri perkebunan sawit di Mesuji, Lampung, yang dimana akan dikelola oleh

Capaian pemerintah untuk meningkatkan keamanan domestiknya tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan kondusifitas dalam berbangsa dan bernegara, akan tetapi juga berguna untuk meyakinkan minat para investor Jepang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sejak tahun 2000 hingga 2012, tidak banyak ancaman yang tertuju pada asset asing, walaupun ada beberapa serangan terhadap asset asing, misalnya Bom Bali I dan Bom Bali II, pengeboman hotel J.W. Marriot, sabotase lahan perkebunan di Riau, konflik Mesuji, dan lain-lain, namun itu semua tidak berdampak serius terhadap ketahanan modal asing di Indonesia. Hal demikian dikarenakan kesiap-siagaan aparat kepolisian dan militer untuk mengamankan titik ancaman tersebut serta berhasil menangkap para pelaku maupun provokator di setiap gangguan yang terjadi.

Dengan situasi dan kondisi domestik yang relatif aman dari gangguan gejala sosial-politik, sudah barang tentu akan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Para investor asing pun tidak segan untuk menanamkan modalnya jika keadaan lokalitas tempat dimana ia menanamkan modalnya terlihat kondusif. Terutama dalam investasi berbentuk investasi langsung, semacam alokasi/relokasi industry, ekstraksi industry, *refining* sumber daya alam, dan jenis investasi asing lainnya yang berbentuk fisik.

D. Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, Indonesia dan Jepang

Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA) guna melanjutkan prinsip liberalisasi barang dan jasa maupun hal-hal tambahan penting yang tidak dibahas dalam ODA. Liberalisasi barang dan jasa akan diimplementasikan dalam bentuk penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Dalam perjanjian JIEPA, hampir semua pos tarif dihapuskan. Jepang telah memasukkan lebih dari 90% pos tarif yang akan setara dengan 99% dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Hampir sama dengan Jepang, Indonesia juga menyepakati lebih dari 93% pos tarif yang akan setara dengan 92% dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia. Untuk perlindungan, Jepang melakukan exclusion list (daftar pengecualian) bagi 886 pos tarif, demikian juga Indonesia yang memberlakukan bagi 834 pos tarif.

Kesepakatan JIEPA yang didalamnya tertulis bahwa Jepang akan memberikan bantuan guna mengembangkan industri manufaktur Indonesia. Walaupun pengembangan manufaktur bukan hal baru dalam kerjasama Indonesia dengan Jepang, namun ini tetap merupakan program strategis bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, ini akan meningkatkan kualitas produksi manufaktur Indonesia, dan bagi Jepang akan memperlebar ruang investasi di sektor manufaktur.

Dalam sub-manufaktur tersebut, Jepang juga akan memberikan bantuan pengembangan industri rumah tangga berupa bahan baku dari industri kimianya. Bagi Indonesia, ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas produksi sektor rumah tangga. Bagi Jepang, ini akan menjadi peluang

akan membantu Indonesia dalam pengembangan produksi komponen elektronik. Bagi Indonesia, tetap sama, hal itu dapat dijadikan peluang Indonesia meningkatkan kualitas produksi komponen elektronik. Dan bagi Jepang tidak jauh berbeda, program tersebut dapat dijadikan saluran investasi di sektor manufaktur komponen elektronik.

Seperti kita ketahui, investasi Jepang ke Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1980-an, meskipun dalam perkembangannya ada fluktuasi angka dalam investasi tersebut. Bila periode 1990-1999 Indonesia menempati ranking kedua tujuan FDI Jepang, maka periode 2000-2009, porsi Indonesia berada pada urutan ketujuh dari total investasi Jepang. Nomor satu adalah Cina, dan posisi Indonesia telah tergeser oleh Thailand, India, Korea Selatan, Singapura dan Hongkong. Dengan adanya JIEPA, pada tahun 2009-2012, nilai investasi Jepang di Indonesia meningkat. Dan secara keseluruhan, Indonesia menempati urutan tiga besar terhadap total investasi.

Besarnya manfaat investasi Jepang ke Indonesia tetap dilihat oleh seberapa besar investasi tersebut dapat memberikan nilai tambah dan mengembangkan industrialisasi dan kemajuan ekonomi bagi Indonesia. Selain nilai investasi, sektor yang menjadi pilihan investasi Jepang di Indonesia juga mengalami pergeseran. Saat ini sektor yang mendominasi investasi Jepang adalah infrastruktur dan sumber daya alam yaitu energi, barang tambang, kertas dan kayu. Terlihat bahwa strategi investasi yang dijalankan Jepang dalam JIEPA sangat jelas, yakni terfokus untuk sektor-sektor yang mendukung penjamin

industri Jepang serta sektor infrastruktur dimana Jepang memiliki kompetensi tinggi dengan dukungan sumber daya manusia dan teknologi. Strategi industrialisasi Jepang sudah jelas dijalankan dengan jalan investasi luar negeri.

Alasan Jepang menjadikan Indonesia sebagai lokasi tujuan investasi sesuai dengan karakteristik Indonesia yang nyatanya benar menarik investor Jepang. Alasan tersebut adalah, pertama, dari sisi produksi, biaya tenaga kerja di Indonesia masih relatif murah dibandingkan negara-negara lain. Indonesia juga sangat strategis sebagai basis ekspor Jepang ke negara lain dan basis pasokan bagi perakitan manufaktur Jepang. Kedua, Indonesia merupakan pangsa pasar yang sedang tumbuh. Dan dari segi politik yaitu adanya kebijakan